



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012

TENTANG

POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kementerian Kesehatan di bidang pengelolaan kearsipan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1415/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan dibidang kearsipan serta pengembangan fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan, maka Pola Klasifikasi dan Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pola Klasifikasi dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 684/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;

2. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pola Klasifikasi dan Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi semua unit Organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1415/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE
UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

POLA KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

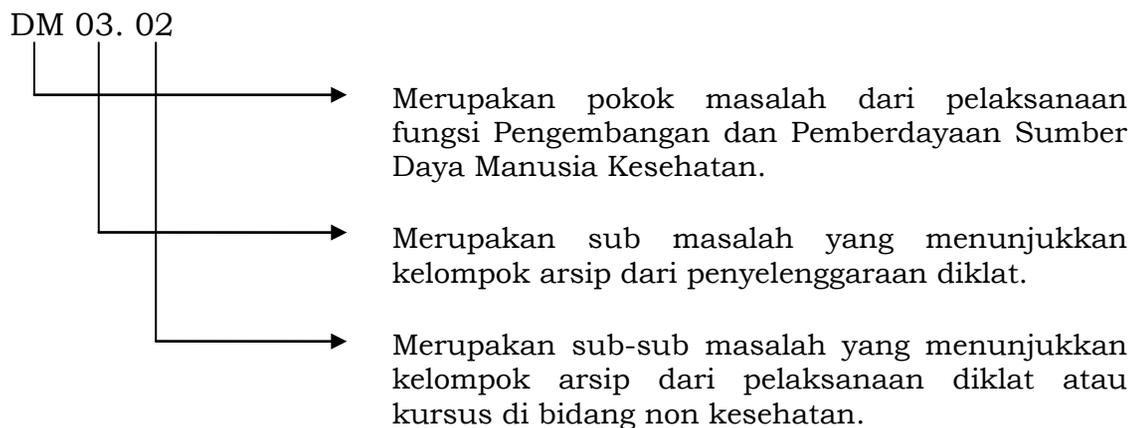
I. PENDAHULUAN

Pola klasifikasi digunakan untuk melakukan penataan berkas dengan sistem masalah. Adapun tujuan penggunaan pola klasifikasi ini adalah agar arsip yang masalahnya sama akan terkumpul/terkelompok dalam satu berkas sehingga penyimpanannya dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

Pola klasifikasi ini disusun secara berjenjang mulai dari pokok masalah, sub masalah dan sub-sub masalah. Ada dua unsur penting dalam klasifikasi ini, yakni kode dan indeks. Kode digunakan untuk membedakan masalah utama sampai pada rinciannya dan pada keputusan ini kode yang digunakan adalah kode *alpha numeric*, yakni kode gabungan angka dan huruf. Sedangkan indeks digunakan sebagai sarana untuk mengenal dan mengatur arsip.

Pola klasifikasi ini dibedakan menjadi Pola Klasifikasi Substantif dan Pola Klasifikasi Fasilitatif. Pola Klasifikasi Substantif adalah pola klasifikasi dari kegiatan pokok Kementerian Kesehatan sedangkan Pola Klasifikasi Fasilitatif menggambarkan tugas-tugas yang mendukung kegiatan pokok.

Contoh penggunaan Klasifikasi Arsip:





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

I. POLA KLASIFIKASI SUBSTANTIF

DM : PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Perencanaan dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 01.02. Kemandirian dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 01.03. Perencanaan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 01.04. Sumber Daya Pendidikan
- 01.05. Pengembangan Kurikulum
- 01.06. Kendali Mutu
- 01.07. Diklat Kepemimpinan
- 01.08. Diklat Manajemen Kesehatan
- 01.09. Diklat Teknis dan Fungsional
- 01.10. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Indonesia
- 01.11. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Asing
- 01.12. Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 02.01. Perencanaan dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 02.02. Kemandirian dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 02.03. Perencanaan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 02.04. Sumber Daya Pendidikan
- 02.05. Pengembangan Kurikulum
- 02.06. Kendali Mutu
- 02.07. Diklat Kepemimpinan
- 02.08. Diklat Manajemen Kesehatan
- 02.09. Diklat Teknis dan Fungsional
- 02.10. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 02.11. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Asing
- 02.12. Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan

- 03. PENYELENGGARAAN DIKLAT, KURSUS
 - 03.01. Bidang Kesehatan
 - 03.02. Bidang Non Kesehatan

- 04. ADMINISTRASI DIKLAT
 - 04.01. Surat Pemanggilan Peserta
 - 04.02. Panduan Diklat
 - 04.03. Bahan Ajar Diklat
 - 04.04. Daftar Hadir
 - 04.05. Formulir Evaluasi
 - Evaluasi Penyelenggaraan
 - Evaluasi Pengajar
 - Evaluasi Pasca Pelatihan
 - 04.06. Sertifikat/ STTPL

- 05. PENYELENGGARAAN PERTEMUAN SOSIALISASI, SEMINAR, LOKAKARYA, APRESIASI, PENYULUHAN
 - 05.01. Bidang Kesehatan
 - 05.02. Bidang Non Kesehatan
 - 05.03. Narasumber

- 06. SERTIFIKASI SDM
 - 06.01. Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 06.02. Sumber Daya Manusia Non Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

GK : BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Gizi Makro
- 01.02. Gizi Mikro
- 01.03. Gizi Klinik
- 01.04. Konsumsi Makanan
- 01.05. Kewaspadaan Gizi
- 01.06. Kesehatan Ibu Hamil
- 01.07. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
- 01.08. Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
- 01.09. Keluarga Berencana
- 01.10. Perlindungan Kesehatan Reproduksi
- 01.11. Kelangsungan Hidup Bayi
- 01.12. Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah
- 01.13. Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko
- 01.14. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja
- 01.15. Perlindungan Kesehatan Anak
- 01.16. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan
- 01.17. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan
- 01.18. Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer
- 01.19. Penapisan dan Kemitraan
- 01.20. Pelayanan Kesehatan Kerja
- 01.21. Kapasitas Kerja
- 01.22. Lingkungan Kerja
- 01.23. Kemitraan Kesehatan Kerja
- 01.24. Kesehatan Perkotaan dan Olahraga

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 02.01. Gizi Makro
- 02.02. Gizi Mikro
- 02.03. Gizi Klinik
- 02.04. Konsumsi Makanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 02.05. Kewaspadaan Gizi
- 02.06. Kesehatan Ibu Hamil
- 02.07. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
- 02.08. Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
- 02.09. Keluarga Berencana
- 02.10. Perlindungan Kesehatan Reproduksi
- 02.11. Kelangsungan Hidup Bayi
- 02.12. Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah
- 02.13. Kewaspadaan Penangan Balita Beresiko
- 02.14. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja
- 02.15. Perlindungan Kesehatan Anak
- 02.16. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan
- 02.17. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan
- 02.18. Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer
- 02.19. Penapisan dan Kemitraan
- 02.20. Pelayanan Kesehatan Kerja
- 02.21. Kapasitas Kerja
- 02.22. Lingkungan Kerja
- 02.23. Kemitraan Kesehatan Kerja
- 02.24. Kesehatan Perkotaan dan Olahraga



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

HJ : KESEHATAN HAJI

01. PENYUSUNAN STANDARISASI

- 01.01. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
- 01.02. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji

02. PEMBINAAN KESEHATAN

- 02.01. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
- 02.02. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji

03. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 03.01. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
- 03.02. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji

04. PENATAUSAHAAN PEYELENGGARAN TENAGA KESEHATAN HAJI

- 04.01. Proses Rekrutmen
 - Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
 - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

IK : INTELIGENSIA KESEHATAN

01. PENYUSUNAN PROGRAM KEBIJAKAN

01.01. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan
Inteligensia Kesehatan

- Anak
- Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia

01.02. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan

- Akibat Gangguan Bawaan
- Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem
Persyarafan

02. PENYUSUNAN RANCANGAN

02.01. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan
Inteligensia Kesehatan

- Anak
- Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia

02.02. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan

- Akibat Gangguan Bawaan
- Akibat gangguan Degeneratif dan Sistem
Persyarafan

03. PENGKAJIAN DAN PELAKSANAAN

03.01. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan
Inteligensia Kesehatan

- Anak
- Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia

03.02. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan

- Akibat Gangguan Bawaan
- Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem
Persyarafan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

04. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 04.01. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan
 - Anak
 - Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia

- 04.02. Penanggulangan Masalah Inteligensia Masalah Kesehatan
 - Akibat Gangguan Bawaan
 - Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JP : PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STANDAR

- 01.01. Jaminan Kesehatan
- 01.02. Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan
- 01.03. Pembiayaan

02. MONITORING DAN EVALUASI

- 02.01. Jaminan Kesehatan
- 02.02. Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan
- 02.03. Pembiayaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KF : BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Penggunaan Obat Rasional
- 01.02. Farmasi Komunitas
- 01.03. Farmasi Klinik
- 01.04. Pelayanan Kefarmasian
- 01.05. SAS (*Special Access Sceme*)
- 01.06. Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 01.07. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 01.08. Alat Kesehatan Elektromedik
- 01.09. Alat Kesehatan Non Elektromedik
- 01.10. Produk Diagnostik dan Reagensia
- 01.11. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 02.01. Penggunaan Obat Rasional
- 02.02. Farmasi Komunitas
- 02.03. Pelayanan Farmasi
- 02.04. Farmasi Klinik
- 02.05. SAS (*Special Access Sceme*)
- 02.06. Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 02.07. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 02.08. Alat Kesehatan Elektromedik
- 02.09. Alat Kesehatan Non Elektromedik
- 02.10. Produk Diagnostik dan Reagensia
- 02.11. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

03. PENGELOLAAN OBAT

- 03.01. Analisis dan Standarisasi Harga Obat
- 03.02. Pelayanan Penyangga Obat Pusat (*Buffer Stock*)
- 03.03. Pelayanan Kesehatan Dasar
- 03.04. Program Obat Nasional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 03.05. Program Obat Esensial
 - 03.06. Obat Generik
 - 03.07. Obat Tradisional
04. PELAYANAN KEFARMASIAN
- 04.01. Narkotika
 - 04.02. Psikotropika
 - 04.03. Prekursor dan Sediaan Farmasi bahan baku
(Farmasi Khusus)
 - 04.04. Industri Ekstrak Bahan Alam
 - 04.05. Industri Farmasi (IF)
 - 04.06. Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 - 04.07. Kosmetik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

KK : PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- 01.02. Tanggap Darurat dan Pemulihan
- 01.03. Pemantauan dan Informasi

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 02.01. Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- 02.02. Tanggap Darurat dan Pemulihan
- 02.03. Pemantauan dan Informasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

LB : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, RENCANA, DAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
 - 01.01. Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 - 01.02. Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
 - 01.03. Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
 - 01.04. Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat

02. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
 - 02.01. Pelaksanaan Penelitian
 - Proposal Penelitian
 - Protokol Penelitian
 - Rekomendasi Komisi Etik
 - Perintah Pelaksanaan Penelitian
 - Pengumpulan Data
 - Laporan Hasil Penelitian
 - 02.02. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Kesehatan
 - 02.03. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
 - 02.04. Pengelolaan Laboratorium Penunjang

03. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
 - 03.01. Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 03.02. Utilisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 03.03. Promosi Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 03.04. Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian Dan Pengembangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PK : PROMOSI KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Advokasi
- 01.02. Kemitraan
- 01.03. Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat
- 01.04. Metode Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan
- 01.05. Teknologi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan

02. ADVOKASI DAN KEMITRAAN

02.01. ADVOKASI

- Kebijakan Berwawasan Kesehatan
 - * Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Rokok, Penyakit Tidak Menular, dan lain-lain.
- Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- Advokasi Kesehatan
- *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

02.02. KEMITRAAN

- Organisasi Masyarakat
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Dunia Usaha

03. PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

03.01. Pemberdayaan Masyarakat

- Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif
- *Japan International Cooperation Agency (JICA)*
- Model Pemberdayaan
- Lomba Desa
- Surf AID

03.02. Peran Serta Masyarakat

- Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)
- Penghargaan Masyarakat Berprestasi Pada Bidang Kesehatan
- Penghargaan Mitra Bakti Husada, Kader Lestari



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- Hari Anak Nasional (HAN)
- Saka Bhakti Husada (SBH)
- Perkemahan Bakti SBH Nasional (Pertinas)
- Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
- Posyandu
- Poskesdes, Poskestren

04. METODE TEKNOLOGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

04.01. Metode Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga (Surat, Dokumen)
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
- Penyebarluasan Informasi Program Prioritas
- Penyebarluasan Informasi MDG's
- Promosi Kesehatan Puskesmas
- Pengembangan Sistem Informasi PHBS dan Desa Siaga
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung

04.02. Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

- Pameran
- Leaflet
- Media Cetak (Selebaran, *Banner* (X,Y, Roll), Poster, Buku, Brosur, *Factsheet*)
- Media Elektronik (Master (Betacam, CD), Film, DVD, Spot Radio, ILM, dll)
- *Merchandise* Promosi Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- Foto-foto
- Merancang Desain Media
- Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Mobil Pameran
- Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Luar Ruang (Spanduk, Umbul-umbul, *Neon Box*, *Gaint Banner*, *Bill Board*) dll



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PM : PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
- 01.02. Imunisasi
- 01.03. Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
- 01.04. Kesehatan Matra
- 01.05. Pengendalian Tuberkulosis
- 01.06. Pengendalian *Acquired Immun Deficiency Syndrome* (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual
- 01.07. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
- 01.08. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
- 01.09. Pengendalian Kusta dan Frambusia
- 01.10. Pengendalian Malaria
- 01.11. Pengendalian Arbovirosis
- 01.12. Pengendalian Zoonosis
- 01.13. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
- 01.14. Pengendalian Vektor
- 01.15. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- 01.16. Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
- 01.17. Pengendalian Penyakit Kanker
- 01.18. Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif
- 01.19. Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
- 01.20. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
- 01.21. Penyehatan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum
- 01.22. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
- 01.23. Higiene Sanitasi Pangan
- 01.24. Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 02.01. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
- 02.02. Imunisasi
- 02.03. Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
- 02.04. Kesehatan Matra
- 02.05. Pengendalian Tuberkulosis
- 02.06. Pengendalian *Acquired Immun Deficiency Syndrome* (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual
- 02.07. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
- 02.08. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
- 02.09. Pengendalian Kusta dan Frambusia
- 02.10. Pengendalian Malaria
- 02.11. Pengendalian Arbovirosis
- 02.12. Pengendalian Zoonosis
- 02.13. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
- 02.14. Pengendalian Vektor
- 02.15. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- 02.16. Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
- 02.17. Pengendalian Penyakit Kanker
- 02.18. Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif
- 02.19. Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
- 02.20. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
- 02.21. Penyehatan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum
- 02.22. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
- 02.23. Higiene Sanitasi Pangan
- 02.24. Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

UK : BINA UPAYA KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

- 01.01. Pelayanan Kesehatan Dasar
- 01.02. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 01.03. Pelayanan Kedokteran Keluarga
- 01.04. Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayan Darah
- 01.05. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
- 01.06. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik
- 01.07. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat
- 01.08. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
- 01.09. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan
- 01.10. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
- 01.11. Pelayanan Keperawatan Dasar
- 01.12. Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum
- 01.13. Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus
- 01.14. Pelayanan Kebidanan
- 01.15. Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
- 01.16. Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi
- 01.17. Pelayanan Patologi dan Toksikologi
- 01.18. Pelayanan Radiologi
- 01.19. Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 01.20. Peralatan Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 01.21. Pelayanan Kesehatan Jiwa Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 01.22. Pelayanan Kesehatan Jiwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 01.23. Etikolegal dan Assesmen Kesehatan Jiwa



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 01.24. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok dan Alkohol
- 01.25. Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

- 02.01. Pelayanan Kesehatan Dasar
- 02.02. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 02.03. Pelayanan Kedokteran Keluarga
- 02.04. Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayan Darah
- 02.05. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
- 02.06. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik
- 02.07. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat
- 02.08. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
- 02.09. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan
- 02.10. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
- 02.11. Pelayanan Keperawatan Dasar
- 02.12. Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum
- 02.13. Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus
- 02.14. Pelayanan Kebidanan
- 02.15. Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
- 02.16. Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi
- 02.17. Pelayanan Patologi dan Toksikologi
- 02.18. Pelayanan Radiologi
- 02.19. Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 02.20. Peralatan Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 02.21. Pelayanan Kesehatan Jiwa Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 02.22. Pelayanan Kesehatan Jiwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 02.23. Etikolegal dan Assesmen Kesehatan Jiwa
 - 02.24. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok dan Alkohol
 - 02.25. Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko
03. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
- 03.01. Pelayanan Kesehatan Dasar
 - 03.02. Pelayanan Kesehatan Khusus
 - 03.03. Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

II. POLA KLASIFIKASI FASILITATIF

BN : BARANG NEGARA

01. PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 01.01. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- 01.02. Telaahan Pelaksanaan Lelang/Pemilikan/Penunjukan Langsung
- 01.03. Dokumen Lelang

02. PENYIMPANAN BARANG DAN DISTRIBUSI

- 02.01. Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara (IKN)
 - Surat Bukti Barang Masuk
 - Surat Bukti Pengeluaran Barang
- 02.02. Pendistribusian
 - Surat Jalan Pengiriman Barang

03. PENGHAPUSAN BARANG

- 03.01. Rekomendasi
- 03.02. Surat Keputusan
- 03.03. Berita Acara

04. PERHITUNGAN TARIF JASA

- 04.01. Pedoman

05. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

- 05.01. Daftar Barang Ruangan (DBR)
- 05.02. Kartu Inventaris Barang (KIB)
- 05.03. Kartu Inventaris Laporan (KIL)
- 05.04. Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT)
- 05.05. Laporan Triwulan Inventaris (LTI)
- 05.06. Akuntansi Barang Milik Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

06. PENATAUSAHAAN PERALATAN BARANG MILIK NEGARA

- 06.01. Barang Bergerak
- 06.02. Barang Tidak Bergerak
- 06.03. Barang-barang Lainnya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

HK : HUKUM

01. PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT MENGATUR

- 01.01. Undang-Undang
- 01.02. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 01.03. Peraturan Pemerintah
- 01.04. Peraturan Presiden
- 01.05. Peraturan Menteri Kesehatan
- 01.06. Peraturan Bersama Menteri
- 01.07. Peraturan Pejabat Eselon I

02. PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT MENETAPKAN

- 02.01. Keputusan Presiden
- 02.02. Keputusan Menteri Kesehatan
- 02.03. Keputusan Pejabat Eselon I
- 02.04. Keputusan Pejabat Eselon II
- 02.05. Surat Keputusan Bersama (SKB)
- 02.06. Perizinan

03. PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT ARAHAN

- 03.01. Instruksi
- 03.02. Pidato/ Sambutan Pimpinan
- 03.03. Surat Edaran

04. TELAAHAN HUKUM/ KAJIAN HUKUM

- 04.01. Berkaitan dengan Kasus
- 04.02. Berkaitan dengan Perumusan Produk Hukum
- 04.03. Berkaitan dengan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan
- 04.04. Berkaitan dengan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
- 04.05. Berkaitan dengan Sertifikasi Barang Milik Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

05. PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) / KONTRAK

- 05.01. Kerjasama di Dalam Negeri
 - Antar Instansi Pemerintah
 - Organisasi Non Pemerintah
- 05.02. Kerjasama Dengan Luar Negeri
 - Antar Pemerintah
 - Organisasi Non Pemerintah

06. BANTUAN HUKUM

- 06.01. Perdata
- 06.02. Pidana
- 06.03. Tata Usaha Negara
- 06.04. Hak Uji Materiil
- 06.05. *Judicial Review*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

IR : INFORMATIKA

01. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

- 01.01. Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan
- 01.02. Pengembangan Metode dan Standar Sistem Informasi
- 01.03. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 01.04. Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data dan Informasi

02. PENYEDIAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

- 02.01. Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 02.02. Analisis dan Penyajian Data/ Informasi
- 02.03. Pelayanan dan Penyebaran Data
 - Elektronik
 - Data Cetak/*Hard Copy*

03. BANK DATA

- 03.01. Pengelolaan
- 03.02. Pembinaan
- 03.03. Koordinasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

KM : KOMUNIKASI PUBLIK

01. MEDIA MASSA

- 01.01. Liputan
- 01.02. Wawancara
- 01.03. Penyajian Berita
- 01.04. Pertemuan Media Massa

02. OPINI PUBLIK

- 02.01. Analisis Opini Publik
- 02.02. Kliping/ Berita Kesehatan
 - Media Cetak
 - Media Elektronik
 - Kliping Elektronik

03. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 03.01. Publikasi
- 03.02. Layanan Informasi
- 03.03. Perpustakaan
- 03.04. Dokumentasi

04. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- 04.01. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah
- 04.02. Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah (Organisasi Sosial /LSM, Profesi, Perguruan Tinggi, Sekolah dan Perusahaan)
- 04.03. Forum Kehumasan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

KN : KEKAYAAN NEGARA

01. PENATAUSAHAAN PENGADAAN DAN PENYIMPANAN

01.01. Penatausahaan Pengadaan

- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- Dokumen Lelang
- Laporan Pengadaan Barang/Jasa Semester I dan II
- Laporan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Semester I dan II

01.02. Penatausahaan Penyimpanan

- Surat Bukti Barang Masuk
- Surat Bukti Pengeluaran Barang
- Berita Acara Barang Masuk
- Berita Acara Barang Keluar
- Surat Jalan
- Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

02. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

02.01. Penatausahaan Barang Milik Negara

- Unit Akuntansi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
- Pembukuan Penataan Barang Milik Negara
- Inventarisasi Barang Milik Negara
- Laporan Barang Milik Negara
- Laporan Persediaan

02.02. Pemanfaatan Barang Milik Negara

- Penghunian Rumah Negara
- Pendaftaran Rumah Negara
- Surat Ijin Penghunian
- Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Negara
- Teguran Kepada Penghuni Rumah Negara
- Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
- Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- Sertifikat Tanah
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Buku Milik Kendaraan Bermotor (BPKB)/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Barang Milik Negara

02.03. Penghapusan Barang Milik Negara

- Dokumen Proses Usulan Persetujuan Penghapusan
- Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara
- Pengumuman Lelang
- Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Barang Milik Negara yang Diusulkan Hapus
- Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara Yang D hibahkan
- Naskah Hibah Barang Milik Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

KP : KEPEGAWAIAN

01. PENGADAAN PEGAWAI

- 01.01. Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai
- Perencanaan Kebutuhan Pegawai/Pegawai Tidak Tetap (PTT)
 - Perencanaan Kebutuhan Penugasan Khusus
- 01.02. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
- Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai
 - Seleksi Administrasi
 - Pemanggilan Peserta Tes
 - Pelaksanaan Ujian Tertulis
 - Keputusan Hasil Ujian
 - Wawancara/Litsus
 - Penetapan Tahap Akhir
 - Usulan Pengangkatan
 - Pengumuman Kelulusan
 - Nota Usulan Calon Pegawai ke Badan Kepegawaian Negara
 - Nota Persetujuan Calon Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara
 - Daftar Urut Kepangkatan
 - Kartu Suami/Kartu Istri/Kartu Pegawai
 - Penempatan Calon Pegawai
 - Peningkatan status CPNS menjadi PNS
 - Ralat SK
 - Pemberhentian CPNS
- 01.03. Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus
- Pengumuman Penerimaan PTT
 - Seleksi PTT
 - Pengangkatan PTT
 - Penempatan PTT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- Penugasan Khusus
- Pemindahan PTT
- Perubahan Kriteria

02. MUTASI PEGAWAI

- 02.01. Kenaikan Pangkat
- 02.02. Kenaikan Pangkat Pilihan
- 02.03. Kenaikan Anumerta
- 02.04. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
- 02.05. Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun
- 02.06. Informasi dan Tata Naskah
 - Data Keluarga
 - Statistik Kepegawaian

03. PENGEMBANGAN PEGAWAI

- 03.01. Penilaian dan Pengembangan Karier
 - Penyiapan Penilaian Kinerja
 - Jabatan Struktural
 - Tugas dan Izin Belajar
 - Ujian Dinas
 - Pelaksana Tugas/Harian
 - Usulan Diklat PIM
- 03.02. Administrasi Jabatan Fungsional
 - DUPAK, Usul, SK
- 03.03. Administrasi Tenaga Strategis
 - Praktek Tenaga Medis/Paramedis
 - Pendidikan Spesialis

04. UMUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

- 04.01. Peraturan Kepegawaian
 - Izin Kawin/Cerai
 - Cuti Pegawai



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- Kasus Kepegawaian
- Hukuman Pegawai
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

04.02. Penghargaan Pegawai

- Piagam/Lencana/Plakat
- Poliklinik Kesehatan Pegawai
- Askes/Taspen/Taperum
- Santunan
- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai/Calon Pegawai

04.03. Tata Usaha Kepegawaian

- Penugasan/ Penunjukkan Surat Perintah
- Absensi
- Monitoring



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

KR : KERUMAHTANGGAAN

01. PELAYANAN

01.01. Umum

- Peminjaman Ruangan
- Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor

01.02. Khusus

- Pelayanan Kepada Pimpinan
- Pakaian Dinas Pegawai
- Pakaian Dinas Satpam
- Petugas Kebersihan

02. PEMELIHARAAN

02.01. Perbaikan Sarana dan Prasarana

02.02. Perbaikan Peralatan dan Mesin

02.03. Pertamanan / Penghijauan

03. PENGELOLAAN DAYA DAN JASA

03.01. Listrik

03.02. Telepon

03.03. Air

03.04. TV Kabel, Internet dan Intranet

03.05. Pos

03.06. Instalasi Vital

04. PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

04.01. Pengurusan Surat-surat Kendaraan

04.02. Penggunaan Kendaraan

05. PENGAMANAN

05.01. Daftar Satuan Pengamanan

05.02. Daftar Jaga/Piket

05.03. Catatan Kejadian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- 05.04. Surat Ijin Keluar Masuk Orang atau Barang
- 05.05. Kehilangan
- 05.06. Kerusakan
- 05.07. Kecelakaan

06. KETERTIBAN

- 06.01. Lingkungan Kerja
- 06.02. Sarana Kerja



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

KS : KERJASAMA LUAR NEGERI

01. PENYUSUNAN DOKUMEN KLN

- 01.01. Telaah Permohonan
- 01.02. MoU/LoI/*Agreement*
- 01.03. Kertas Posisi/Surat Pendelegasian
- 01.04. Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

02. PENYUSUNAN PROGRAM

- 02.01. Kebijakan Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral
- 02.02. Kebijakan Kerjasama Kesehatan Regional

03. PERENCANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 03.01. Kebijakan Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral
- 03.02. Kebijakan Kerjasama Kesehatan Regional
- 03.03. Kebijakan PHLN

04. ADMINISTRASI HUBUNGAN LUAR NEGERI

- 04.01. Administrasi Kerjasama antar lembaga pemerintah/
non pemerintah dan INGO (*International Non
Government Organization*)
- 04.02. Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

KU : KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

01. TATA LAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

01.01. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Pendapatan Negara Bukan Pajak/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU)
- Penyusunan Target PNBP/ BLU
- Penyusunan Pola Tarif PNBP/ Pola Tarif BLU
- Laporan PNBP BLU

01.02. Perbendaharaan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Keputusan Bendaharaan (yang tanda tangan Sekretaris Jenderal)
- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

01.03. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

- Menyiapkan Bahan Tindak Lanjut LHP
- Memproses Tindak Lanjut LHP
- Menyiapkan Usulan Persetujuan Pembukaan Rekening Pemerintah
- Melaporkan Pembukaan dan Penutupan Rekening
- Memproses Usulan Penghapusan Piutang

02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

02.01. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal

- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
- Penyusunan Laporan Kekayaan Bersih Dalam Neraca
- Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- 02.02. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
 - Penyusunan Laporan Kekayaan Bersih Dalam Neraca
 - Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

OT : ORGANISASI DAN TATALAKSANA

01. PENATAAN KELEMBAGAAN

- 01.01. Penyusunan Kelembagaan
- 01.02. Pengubahan Kelembagaan
- 01.03. Pembubaran Kelembagaan
- 01.04. Evaluasi Kelembagaan
- 01.05. Uraian Jabatan
- 01.06. Analisa Jabatan
- 01.07. Analisa Kinerja

02. KETATALAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

- 02.01. Tatalaksana
- 02.02. Penataan Jabatan Fungsional
- 02.03. Laporan Akuntabilitas
- 02.04. Pelayanan Publik
- 02.05. Sistem dan Prosedur Desentralisasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

PR : PERENCANAAN DAN ANGGARAN

01. PERENCANAAN DAN ANGGARAN

- 01.01. Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program
- 01.02. APBN I
- 01.03. APBN II
- 01.04. APBN III

02. PROGRAM KERJA

- 02.01. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja KL)/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 02.02. Program Prioritas
- 02.03. Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Daftar Normatif Anggaran (DNA)/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/ Rencana Penarikan Dana (RPD)/ Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
- 02.04. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 02.05. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU)
- 02.06. Standar Biaya
 - Umum
 - Khusus
- 02.07. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 02.08. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
- 02.09. Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Perencanaan dan Anggaran
 - Dan Lain-lain

03. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 03.01. Data dan Informasi Anggaran
 - Pidato Presiden
 - Nota Keuangan/RAPBN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- Laporan Tahunan
- Dan lain-lain

03.02. Evaluasi

- Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- Program Prioritas
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Program Lainnya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

PS : PENGAWASAN

01. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN

- 01.01. Pedoman Teknis Pengawasan
- 01.02. Pedoman Standarisasi Pengawasan Pemeriksaan
- 01.03. Pedoman Standar Kinerja Pemeriksaan
- 01.04. Pedoman Standar Pemantauan Tindak Lanjut
- 01.05. Pedoman Lainnya

02. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- 02.01. Audit Kinerja
- 02.02. Audit dengan tujuan tertentu
 - Audit Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Audit Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
 - Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
 - Audit Pelayanan Kesehatan Haji
 - Audit Pengadaan Barang dan Jasa
 - Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 02.03. Review Laporan Keuangan

03. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

- 03.01. Pemantauan Tindak Lanjut LHP
- 03.02. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
- 03.03. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

TU : KETATAUSAHAAN

01. PERJALANAN DINAS

- 01.01. Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - Surat Tugas
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 01.02. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
 - Ijin
 - SP Sekretariat Negara
 - Paspor
 - Visa
 - *Exit Permit*
- 01.03. Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 01.04. Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri

02. KEARSIPAN

- 02.01. Pengelolaan Surat
 - Surat Masuk
 - Surat Keluar
- 02.02. Surat Keterangan
- 02.03. Surat Pengantar
- 02.04. Surat Kuasa
- 02.05. Surat Rekomendasi
- 02.06. Pengumuman
- 02.07. Peminjaman Arsip
- 02.08. Penataan Arsip
- 02.09. Penyusutan Arsip
 - Pemindahan
 - Penyerahan
 - Pemusnahan
- 02.10. Daftar Arsip
- 02.11. Berita Acara Pemusnahan Arsip
- 02.12. Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Arsip



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- 02.13. Jadwal Retensi Arsip
- 02.14. Pembinaan Kearsipan
 - Bimbingan Teknis
 - Supervisi dan Monitoring
- 02.15. Akuisisi Arsip
- 02.16. Laporan Kegiatan
- 02.17. Telaahan

- 03. PENCETAKAN DAN PENGGANDAAN
 - 03.01. Fotokopi
 - 03.02. Cetak

- 04. KEPROTOKOLAN
 - 04.01. Acara Pimpinan
 - Kunjungan Kerja
 - Rapat Dengar Pendapat DPR
 - Raker DPR
 - 04.02. Kunjungan Tamu Dalam Negeri
 - 04.03. Kunjungan Tamu dari Luar Negeri
 - 04.04. Upacara
 - 04.05. Acara Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
 - 04.06. Acara Penyelenggaraan Hari Besar Dunia
 - 04.07. Acara Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan
 - 04.08. Acara Kedinasan (Pelantikan, Peresmian)
 - 04.09. Ucapan (Terima Kasih, Selamat, Bela Sungkawa)
 - 04.10. Kegiatan Sosial

- 05. RAPAT
 - 05.01. Undangan
 - 05.02. Rapat Kerja
 - 05.03. Rapat Teknis
 - 05.04. Rapat Koordinasi Pimpinan
 - 05.05. Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- 05.06. Rapat Koordinasi Staf
- 05.07. Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- 05.08. Rapat Koordinasi Lintas Program
- 05.09. Rapat Rutin
- 05.10. Musyawarah Nasional (Munas)
- 05.11. Rapat Paripurna
- 05.12. Notulen rapat

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE
UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

KODE UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Sekretariat Jenderal

I. Biro Perencanaan dan Anggaran

1. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program
2. Bagian APBN I
3. Bagian APBN II
4. Bagian APBN III
5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Biro Kepegawaian

1. Bagian Pengadaan Pegawai
2. Bagian Mutasi Pegawai
3. Bagian Pengembangan Pegawai
4. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai
5. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

1. Bagian Tatalaksana Keuangan dan Perbendaharaan
2. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan
3. Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan
4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

5. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Biro Hukum dan Organisasi

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan
2. Bagian Pelayanan Hukum
3. Bagian Kelembagaan
4. Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Biro Umum

1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
2. Bagian Tata Usaha Kementerian
3. Bagian Rumah Tangga
4. Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal
5. Kelompok Jabatan Fungsional

VI. Pusat Data dan Informasi

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Statistik Kesehatan
3. Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi
4. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data
5. Kelompok Jabatan Fungsional

VII. Pusat Kerja Sama Luar Negeri

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral
3. Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional
4. Kelompok Jabatan Fungsional

VIII. Pusat Promosi Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Advokasi dan Kemitraan
3. Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

4. Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

IX. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
4. Bidang Pemantauan dan Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

X. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pembiayaan Kesehatan
3. Bidang Jaminan Kesehatan
4. Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

XI. Pusat Komunikasi Publik

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Media Massa dan Opini Publik
3. Bidang Pelayanan Informasi Publik
4. Bidang Hubungan Antar Lembaga
5. Kelompok Jabatan Fungsional

XII. Pusat Inteligensia Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan
3. Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

XIII. Pusat Kesehatan Haji

1. Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

2. Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Resiko Kesehatan Haji
3. Subbagian Tata Usaha
4. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Kepegawaian dan Umum
5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Direktorat Bina Gizi

1. Subdirektorat Bina Gizi Makro
2. Subdirektorat Bina Gizi Mikro
3. Subdirektorat Bina Gizi Klinik
4. Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan
5. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi
6. Subdirektorat Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Direktorat Bina Kesehatan Ibu

1. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil
2. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
3. Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
4. Subdirektorat Bina Keluarga Berencana
5. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi
6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Direktorat Bina Kesehatan Anak

1. Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

2. Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah
 3. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko
 4. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Anak Usia Sekolah dan Remaja
 5. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak
 6. Subbagian Tata Usaha
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- V. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisioanal Keterampilan
 2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan
 3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer
 4. Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan
 5. Subbagian Tata Usaha
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- VI. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja
 2. Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja
 3. Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja
 4. Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja
 5. Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga
 6. Subbagian Tata Usaha
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- C. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- I. Sekretariat Direktorat Jenderal
1. Bagian Program dan Informasi
 2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
 3. Bagian Keuangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

4. Bagian Kepegawaian dan Umum
5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah
5. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan
5. Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

5. Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
 6. Subbagian Tata Usaha
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- V. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
1. Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi
 2. Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi
 3. Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi
 4. Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan
 5. Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 6. Subbagian Tata Usaha
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- VI. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
1. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 2. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 3. Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa
 4. Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok dan Alkohol
 5. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko
 6. Subbagian Tata Usaha
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- D. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- I. Sekretariat Direktorat Jenderal
1. Bagian Program dan Informasi
 2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
 3. Bagian Keuangan
 4. Bagian Kepegawaian dan Umum
 5. Kelompok Jabatan Fungsional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- II. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 - 1. Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 2. Subdirektorat Imunisasi
 - 3. Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
 - 4. Subdirektorat Kesehatan Matra
 - 5. Subbagian Tata Usaha
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional

- III. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 1. Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis
 - 2. Subdirektorat Pengendalian *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual
 - 3. Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
 - 4. Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
 - 5. Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia
 - 6. Subbagian Tata Usaha
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- IV. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 - 1. Subdirektorat Pengendalian Malaria
 - 2. Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis
 - 3. Subdirektorat Pengendalian Zoonosis
 - 4. Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
 - 5. Subdirektorat Pengendalian Vektor
 - 6. Subbagian Tata Usaha
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- V. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 1. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - 2. Subdirektorat Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
 - 3. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker
 - 4. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

5. Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

VI. Direktorat Penyehatan Lingkungan

1. Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
2. Subdirektorat Penyehatan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum
3. Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
4. Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan
5. Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi
6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Kepegawaian dan Umum
5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

1. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat
2. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
4. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

III. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

1. Subdirektorat Standardisasi
2. Subdirektorat Farmasi Komunitas
3. Subdirektorat Farmasi Klinik
4. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

1. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan
2. Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
3. Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

1. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional
2. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan
3. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus
4. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

F. Inspektorat Jenderal

I. Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bagian Umum



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Inspektorat I

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

III. Inspektorat II

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

IV. Inspektorat III

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

V. Inspektorat IV

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

VI. Inspektorat Investigasi

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

VII. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

G. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

I. Sekretariat Badan

1. Bagian Perencanaan dan Anggaran
2. Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
3. Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi
4. Bagian Keuangan dan Umum
5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Biomedis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

3. Bidang Teknologi Dasar Kesehatan

III. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Teknologi Terapan Kesehatan
3. Bidang Epidemiologi Klinik

IV. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Upaya Kesehatan
3. Bidang Sumber Daya Kesehatan

V. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Humaniora Kesehatan
3. Bidang Analisis Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

H. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

I. Sekretariat Badan

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

II. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri
3. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri
4. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

III. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan
4. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

1. Bidang Program dan Pengembangan
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3. Bidang Pengendalian Mutu
4. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Perencanaan dan Program
2. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -